

Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli berdasarkan akta hibah tanah. studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/Pn.Kpj., Malang = The responsibility of public notary in the making of binding sell and purchase deed based on deed of grant. case study on the district Court Verdict of Kepanjen Number: 162/Pdt.G/2012/Pn.Kpj., Malang

Simanjuntak, Jocky Maraldo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20498865&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Tesis ini mengangkat tema tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan APJB tanah terkait adanya Akta Hibah serta bagaimana tanggung jawab pemberi hibah dalam proses pembuatan APJB tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. Untuk memahami tentang bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris beserta segala akibat hukumnya, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yang bermula pada ketentuan hukum, norma dasar maupun peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan analisis maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Tergugat memang telah terbukti secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Sebaliknya, Penggugat dalam hal ini pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan adalah sebagai pemilik yang benar dan sah atas obyek sengketa dan berhak memiliki dan menguasai obyek sengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor: 370/PKS/RP/201 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Rachmat Praptono, S.H. yang pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan sebagai akta yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di mata hukum. Pada intinya Notaris dan PPAT baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kapasitasnya sebagai masyarakat sipil agar tidak menyalahgunakan kewenangan, pengetahuan serta keahlian tersebut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu perbuatan demi menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau kelompok dalam bentuk baik seperti penyelundupan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Demikianlah maka disimpulkan bahwa isi dari putusan pengadilan yang dijadikan acuan contoh kasus pada penulisan ini, berdasarkan pertimbangan hukumnya telah sesuai dan cukup beralasan berdasarkan uraian dan analisis pada bagian pembahasan.

<hr />This thesis envelops the roles and responsibilities of a Notary in the making of APJB of land related to the Deed of Grant and how the grant's responsibility in the process of making APJB in the verdict of Kepanjen District Court Number: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. In order to comprehend the forms of responsibility as well as legal causes of Notary law, the writer chose to use the juridical-normative method of research, which roots to the provisions of law, basic norms and related legislations. After analysis, the writer concludes that the Defendant is proven legitimately and legally has conducted acts against the law. On the contrary, the Plaintiff principally, based on the verdict, is acknowledged legitimately and legally as the owner of the disputed object and has the rights to own and rule over the disputed object. Such verdict has been proven by the Deed of Grant Number: 370/PKS/RP/201 dated December 28, 2011 that has been made by and/or before Rachmat Praptono, S.H., which principally, based on such verdict has been acknowledged as a legitimate deed and has an abiding force of law. Conclusively, on their duty and role as a civilian, a

Notary and PPAT should not abuse their authority, knowledge and competency in the form of smuggling of law, against the provisions of law in order to profit themselves. Thus, the court verdict of this case, that has been used as a reference for this thesis, based on its legal considerations is in line and reasonable analytically.